

DAMPAK KEBIJAKAN PENGURANGAN SUBSIDI PUPUK TERHADAP PENGGUNAAN PUPUK ALTERNATIF DAN PENDAPATAN USAHATANI MELON PUTIH (*Cucumis melo* ,L)

Nataliningsih¹, Lucky Lukmansyah², Euis Dasipah³, Zahra Nur Safa⁴

^{1,3,4} Program Magister Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Winaya Mukti

²Dinas Pertanian Kabupaten Subang

(Received: 30-01-2025; Published: 28-02-2025)

ABSTRACT

*This study aims to determine the impact of the Fertilizer Subsidy Reduction Policy on the Use of Alternative Fertilizers and Income of White Melon Farming (*Cucumis melo* L). The technique of determining respondents was carried out by drawing a simple random sample of 45 units. The analysis technique used was t test analysis (t test paired). The results of the research obtained from the Fertilizer Subsidy Reduction Policy had an impact on the increase in the use of organic fertilizers as alternative fertilizers where previously used 2,205 kg/ha to 4,146/kg or an increase of 75.68%. The use of urea fertilizer decreased on average from 300 kg/ha to 200 kg/ha or 33.33% and NPK phonska fertilizer from 350 kg/ha to 250 kg/ha or 28.57%. The reduction in the use of urea and NPK phonska fertilizers does not have an impact on decreasing productivity and even tends to increase, due to the increase in organic fertilizers. The Fertilizer Subsidy Reduction Policy has an impact on increasing the production cost of white melon farming from Rp 35,247,955/ha to Rp 36,878,455/ha or an increase of 7.51% This is due to the increase in the use of organic fertilizers. The Fertilizer Subsidy Reduction Policy did not have an impact on decreasing the productivity of white melon farming, in fact there was an increase in productivity from 15,668 kg/ha to 17,111 kg/ha. This is due to the increasing use of organic fertilizers. Furthermore, the Fertilizer Subsidy Reduction Policy has had an impact on the decline in white melon farming income, even increasing from Rp 74,575,330/ha to Rp 82,575,470/ha.*

Keywords: Fertilizer, Subsidies, Income

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk terhadap penggunaan pupuk alternatif dan pendapatan usahatani melon putih (*Cucumis melo* L). Responden ditentukan dengan metode acak sederhana sebanyak 45 unit. Teknik analisis yang digunakan adalah uji-t berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan subsidi pupuk berdampak pada peningkatan penggunaan pupuk organik sebagai pupuk alternatif, dari 2.205 kg/ha menjadi 4.146 kg/ha atau meningkat sebesar 75,68%. Penggunaan pupuk urea menurun dari rata-rata 300 kg/ha menjadi 200 kg/ha (33,33%), sedangkan pupuk NPK Phonska menurun dari 350 kg/ha menjadi 250 kg/ha (28,57%). Penurunan penggunaan pupuk urea dan NPK Phonska tidak menyebabkan penurunan produktivitas, bahkan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya penggunaan pupuk organik. Kebijakan pengurangan subsidi pupuk juga berdampak pada kenaikan biaya produksi usahatani melon putih dari Rp 35.247.955/ha menjadi Rp 36.878.455/ha atau meningkat 7,51%, yang disebabkan oleh meningkatnya penggunaan pupuk organik. Meskipun demikian, produktivitas melon putih meningkat dari 15.668 kg/ha menjadi 17.111 kg/ha. Selanjutnya, kebijakan ini juga berdampak pada peningkatan pendapatan usahatani melon putih, dari Rp 74.575.330/ha menjadi Rp 82.575.470/ha.*

Kata kunci: pupuk, subsidi, pendapatan

PENDAHULUAN

Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu; ada yang berbentuk Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen, keputusan Gubernur dan lain-lain. Peraturan ini dapat dibagi menjadi dua kebijakan-kebijakan yang bersifat pengaturan (*regulating policies*) dan pembagian pendapatan yang lebih adil merata (*distributive policies*) (Suharno, 2022).

Persoalan yang selalu tidak mudah diatasi adalah persoalan keadilan. Hampir setiap kebijakan jarang akan disambut dengan baik oleh semua pihak. Selau ada saja pihak yang memperoleh manfaat lebih besar dari pihak lainnya dan bahkan ada yang dirugikan. Itulah sebabnya masalah kebijakan pertanian bukanlah terletak pada banyak sedikitnya campur tangan pemerintah, tetapi pada berhasil tidaknya kebijakan itu mencapai sasarannya dengan sekaligus mencari keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kebijakan pertanian yang lebih baik adalah yang dapat mencapai tujuan nasional untuk menaikkan produksi secara optimal dengan perlakuan yang adil pada pihak-pihak yang bersangkutan itu Sektor pertanian mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah (Kominfo, 2022).

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di bidang pertanian melalui diluncurkannya berbagai kebijakan dengan bermacam programnya telah dan sedang dijalankan yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan berproduksi, meningkatkan pemerataan pendapatan dan ketahanan pangan (Ellis, 1994). Untuk meningkatkan pendapatan petani dicapai melalui peningkatan produktivitas lahan usahatannya.

Kebijakan pemberian subsidi, terutama subsidi pupuk dan benih yang selama ini ditempuh oleh

pemerintah dalam konteks kebijakan fiskal telah menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi pemerintah dituntut untuk mengurangi jumlah subsidi pupuk dan benih secara bertahap sehingga beban APBN dapat dikurangi demi terwujudnya fiskal sustainability. Di sisi lain pengurangan subsidi pupuk dan benih tentu akan membawa implikasi naiknya harga pupuk dan benih di dalam negeri di samping skim subsidi harga yang selama ini diberikan selama ini dirasakan masih kurang memenuhi rasa keadilan karena belum menunjukkan keberpihakan kepada petani sebagai produsen. Hal inilah yang seringkali mengundang berbagai reaksi di tingkat publik.

Dengan berbagai kondisi yang ada selama krisis global, Pemerintah terus berusaha memenuhi kebutuhan pupuk dan benih kepada petani, dan menyediakan harga yang terjangkau pada saat musim tanam. Dengan demikian, petani berharap harga jual produksinya dapat dibeli dengan harga yang tinggi agar tingkat pendapatan dan kesejahteraannya semakin meningkat. Dalam memenuhi upaya tersebut, Pemerintah dituntut untuk menyesuaikan skim subsidi pupuk dan benih dan menyalurkannya tepat sasaran. Selama subsidi pupuk dan benih diberikan, maka ketepatan penyalurannya menjadi syarat mutlak agar kebijakan fiskal berjalan efektif.

Dalam penentuan harga, petani sebagai produsen utama seringkali menjadi kelompok penerima harga yang ditentukan oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Instansi atau lembaga pemerintah yang menangani pelaksanaan subsidi pupuk dan benih, baik dalam penentuan harga eceran tertinggi (HET) terhadap pupuk, benih dan gabah sampai saat ini belum melakukan koordinasi sesuai dengan harapan seluruh pihak. Di samping itu, masih terlihatnya tumpang tindih kebijakan antar instansi pemerintah menyebabkan subsidi belum efisien dan efektif. Hal yang paling mengejutkan adalah sampai saat ini belum ada kerangka model subsidi pertanian terhadap pupuk dan benih yang komprehensif dan teruji serta mampu menghasilkan model subsidi pupuk dan benih serta kebijakan harga yang tepat, efektif dan efisien.

Beranjak dari permasalahan yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka kajian penyusunan kerangka model kebijakan subsidi pertanian di Indonesia dalam rangka efektivitas dan efisiensi belanja negara bertujuan untuk (i) menyusun model subsidi pertanian terpadu yang berfungsi sebagai alat analisis kebijakan belanja negara di bidang subsidi pertanian, (ii) menyusun dan mengembangkan subsidy forecasting tools yang berguna sebagai alat analisis dan sekaligus instrumen pendukung dalam pengambilan kebijakan fiskal, dan (iii) menghasilkan suatu kebijakan pemberian subsidi pertanian yang tepat sasaran, efektif dan efisien serta mendukung penciptaan ketahanan pangan dan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (Kominfo, 2022).

Kebijakan perampingan subsidi pupuk oleh pemerintah pusat melalui kementerian Pertanian dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Sejak tahun 2023 Permentan tersebut membatasi jenis pupuk subsidi yang sebelumnya lima jenis yakni ZA, Urea, NPK, SP-36, dan pupuk organik Petroganik menjadi dua jenis yaitu Urea dan NPK. Selain itu, pupuk subsidi yang sebelumnya menyasar 70 komoditas pertanian, tahun 2023 menyisakan 9 komoditas utama saja yakni padi, jagung, kedelai, melon, bawang putih, bawang putih, tebu, kopi dan kakao. Kebijakan tersebut berlaku secara nasional hingga ke daerah, sehingga pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, yakni padi, jagung, dan kedelai. hortikultura, yakni melon, bawang putih, dan putih. Serta perkebunan, yakni tebu rakyat, kakao dan kopi (Kominfo, 2022).

Pengurangan pupuk bersubsidi merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10

Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Kebijakan itu mulai diterapkan Juli 2022 dan saat ini merupakan masa peralihan atau transisi. Permentan tersebut menyatakan jenis pupuk bersubsidi hanya urea dan NPK. Sebelumnya, jenis pupuk bersubsidi meliputi urea, NPK, SP36, ZA, dan pupuk organik. Sebelumnya ada 70 komoditas yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, kini tinggal sembilan komoditas, padi, jagung, dan kedelai. hortikultura, yakni melon, bawang putih, dan putih, serta perkebunan, yakni tebu rakyat, kakao dan kopi (Kominfo, 2022).

Implementasi pada tetapan petani terindikasi merugikan petani. Pengurangan jenis pupuk jelas mengancam kesuburan lahan pertanian dan bertentangan dengan konsep pemupukan berimbang yang diprogramkan pemerintah (Suharno, 2022). Padahal, kondisi lahan pertanian sudah jenuh dan butuh pemulihan untuk mengembalikan kesuburan. Tanpa diimbangi dengan pupuk organik, residu bahan kimia pada tanah semakin tinggi dan sulit diurai. Alokasi pupuk yang diterima petani saat ini rata-rata 200 kilogram per hektar untuk urea dan NPK. Alokasi pupuk itu jauh dari kebutuhan pemupukan berimbang dengan pola 500 kg pupuk organik, 300 kg NPK, dan 200 kg urea per hektar. Faktanya, petani menggunakan 400 kg urea dan 350 kg NPK untuk menggenjot produksi agar mampu menutup biaya usaha tani yang terus meningkat.

Petani sebenarnya sudah bersiasat mengatasi kekurangan kebutuhan pupuk dengan membeli pupuk nonsubsidi meski harganya tinggi. Namun, dengan semakin berkurangnya jatah petani, jumlah pupuk nonsubsidi yang harus dibeli semakin besar. Hal itu membebani biaya produksi karena harga eceran tertinggi pupuk urea bersubsidi hanya Rp 2.250 per kg dan NPK bersubsidi

Rp 2.300 per kg. Adapun harga urea nonsubsidi bisa mencapai Rp 10.000 per kg dan NPK bahkan menembus Rp 23.000 per kg. Selisih harga antara pupuk bersubsidi dan nonsubsidi yang mencapai lima kali lipat, bahkan 10 kali lipat, itulah yang memberatkan petani.

Usahatani melon putih adalah salah satu komoditas yang diusahakan petani secara komersial. Usahatani melon putih termasuk usahatani yang memerlukan modal besar dan berisiko tinggi sehingga terkandung unsure spekulatif. Terkait dengan pengurangan subsidi benih dan pupuk, maka komoditas tersebut semakin terhadang dengan potensi risiko usaha. Dengan pengurangan subsidi harga pupuk kemungkinan akan berimplikasi terhadap pemupukan yang biasanya diberikan petani. Sudah barang tentu akan berimbas terhadap capaian produksi dan produktivitas yang selanjutnya akan menentukan besaran pendapatan yang diperoleh dari usahatani tersebut.

Melaporkan capaian produktivitas diperoleh 1.870 kg/ha dan pendapatan Rp 40.000.000/ha. Capaian produksi dan produktivitas dapat mengalami penurunan apabila penggunaan pupuk berkurang dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Secara terus menerus keadaan atau kejadian tersebut akan membentuk pola penawaran petani melon putih. Memperhatikan permasalahan yang muncul pada tingkat petani selaku produsen, menarik untuk dilakukan penelitian terhadap dampak yang terjadi pada pemberlakuan kebijakan pembatasan dan pengurangan subsidi pupuk terhadap usahatani melon putih (Susanti, 2021).

KERANGKA PEMIKIRAN

Hubungan Kebijakan Pengurangan Subsidi Dengan Penggunaan Pupuk Alternatif

Berbagai kebijakan dengan
bermacam programnya yang

diluncurkan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan berproduksi, meningkatkan pemerataan pendapatan dan ketahanan pangan. Untuk meningkatkan pendapatan petani yang dicapai melalui peningkatan produktivitas lahan usahatannya diperlukan pembenahan kelembagaan dan kebijakan pertanian agar mampu melaksanakan fungsi dan peranannya.

Kebijakan pertanian meliputi: garis pedoman, hukum, peraturan-peraturan, SOP untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Kebijakan pertanian merupakan Kebijakan public yaitu sebagai tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang legitimasi untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan privat (orang, lembaga/institusi swasta) Kebijakan diambil didasarkan atas: kewenangan, kebutuhan dan kemampuan. Kebijakan dibuat/diproses oleh lembaga pemerintah atau berdasarkan prosedur yang ditetapkan pemerintah memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan privat masyarakat luas (publik) untuk mengatur kehidupan bersama yang berorientasi pada tujuan dan tindakan. Adanya kebijakan pertanian berupa pengurangan subsidi pupuk akan berpengaruh terhadap berkurangnya penggunaan pupuk subsidi. Untuk menggantikannya maka disubstitusi dengan pupuk alternative nonsubsidi. Tujuan petani melakukan upaya substitusi adalah untuk supaya biaya produksi usahatani tidak lebih besar. Dilihat dari sisi penawaran, maka petani sebagai produsen dengan adanya kebijakan pengurangan subsidi adalah sebagai gangguan keseimbangan dimana secara teori kurva penawaran kegeser atau berotasi kekiri atau dengan istilah lain menjadi kurang elastis (Case Karl, E., dan Fair Ray, 2005). Keadaan yang berakibat pada kurva penawaran (Supply) kurang elastis akan mengurangi

kemampuan petani sebagai produsen dan secara sosial akan terjadi berkurangnya kesejahteraan masyarakat. Dihadapkan pada situasi demikian petani berupaya mencapai keseimbangan baru. Wujud dari upaya mencari keseimbangan baru adalah digunakannya pupuk alternatif.

Hubungan Kebijakan Pengurangan Subsidi Dengan Biaya Produksi

Adanya kebijakan pengurangan subsidi yang menggeser kurva penawaran ke kiri mengakibatkan harga pupuk terdorong naik. Hal tersebut akan membuat petani bereaksi dan apabila mengikuti kenaikan harga pupuk menjadi naik, maka dan penggunaan pupuk tetap dipertahankan, maka biaya produksi akan meningkat. Prposisi yang dapat disampaikan: Kebijakan pengurangan subsidi pupuk dengan asumsi faktor lain tetap maka akan mengakibatkan terjadinya kenaikan biaya produksi. Berbeda apabila petani bereaksi untuk melakukan alternatif penggunaan pupuk lain yang lebih murah. Biaya produksi akan relatif tidak berubah, akan tetapi hal tersebut akan berimplikasi terhadap capaian produksi dan produktivitasnya.

Hubungan Kebijakan Pengurangan Subsidi Dengan Produksi

Keberadaan kelembagaan baik sebagai norma; aturan-aturan maupun sebagai wadah organisasi akan memfasilitasi seluruh kegiatan usahatani. Kelembagaan pertanian akan bekerja sesuai dengan fungsi dan perannya dan menghantakan ke paa keberhasilan usahatani. Norma dan aturan akan bekerja mengatur pola perilaku petani baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan rutin usahatannya. Kelembagaan sebagai wadah (asosiasi) akan bekerja mewadahi para petani sebagai suatu kelompok tani yang lebih bersatu dan memiliki kekuatan

dari soliditas dan kolektivitas. Oleh karenanya dapat diturunkan pernyataan proposisi bahwa *semakin baik berjalannya (berfungsi) kelembagaan pertanian di tingkat petani maka akan semakin baik dalam pencapaian keberhasilan usahatani yang dijalankan petani.*

Hubungan Kebijakan Pengurangan Subsidi Dengan Pendapatan.

Dalam teori produksi yang disampaikan Sukartawi (2007), penerapan teknologi mencakup aspek alat, bahan dan metode produksi dimana dapat memberikan kenaikan hasil dengan pola: kenaikan hasil yang semakin bertambah, kenaikan hasil tetap dan kenaikan hasil yang semakin berkurang. Kenaikan hasil yang semakin bertambah terjadi apabila tambahan hasil yang diperoleh lebih besar dari tambahan input yang digunakan, biasanya terjadi pada masa-masa awal introduksi dan organisme (tanaman, hewan) memberikan respon yang demikian besar.

Dalam introduksi alat, bahan dan cara menanam dengan asumsi dilakukan sesuai dengan petunjuk dan anjuran teknis serta tercukupinya kebutuhan air, tidak terjadi bencana alam, maka tingkat penerapan teknologi usahatani sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan berpengaruh positif terhadap kenaikan produktivitas lahan. Mengingat bahwa produktivitas yang meningkat merupakan salah satu indikator keberhasilan usahatani, maka penerapan teknologi pada usahatani melon putih akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan usahatani.

Selanjutnya terhadap indikator pendapatan dalam hubungannya dengan penerapan teknologi maka dasar teori yang digunakan untuk menurunkan logika pemikiran adalah teori harga, teori biaya dan teori pendapatan. Suatu teknologi akan dapat

diadopsi apabila secara finansial mampu memberikan tambahan kenaikan penerimaan yang lebih besar daripada tambahan kenaikan biaya, sehingga diperoleh kenaikan pendapatan. Pendapatan dalam suatu usahatani adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total. $\pi = TR - TC$ dimana π adalah pendapatan, TR adalah penerimaan total dan TC adalah biaya total. Penerimaan total adalah perkalian antara produk yang dihasilkan baik produk utama yang diperoleh maupun produk sampingannya (*by product*) dengan harga-harga jual yang diterima. Tambahan kenaikan penerimaan (*marginal revenue*) merupakan hasil kali antara tambahan produk dengan harganya. Tambahan produk adalah selisih antara produk sebelum dan sesudah diterapkannya teknologi. Sedangkan tambahan biaya (*marginal cost*) selisih biaya sesudah dan sebelum diterapkannya teknologi. Tambahan pendapatan akan terjadi jika tambahan penerimaan lebih besar daripada tambahan biaya. Oleh karenanya dengan makin bertambahnya produktivitas yang dicapai, maka penerimaan total akan menjadi lebih besar (tinggi). Kenaikan produktivitas lahan usahatani yang disebabkan oleh penerapan teknologi akan meningkatkan pendapatan petani. Pendapatan adalah salah satu indikator keberhasilan usahatani, sehingga dapat dinyatakan bahwa penerapan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas lahan usahatani akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan usahatani.

Hipotesis Penelitian

1. Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk berdampak meningkatkan penggunaan pupuk alternatif pada usahatani melon putih
2. Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk berdampak menurunkan Biaya Produksi usahatani melon putih

3. Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk berdampak tidak menurunkan pendapatan usahatani melon putih

METODE

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian verifikatif, dimana hasil penelitian ini dan kesimpulannya dapat digunakan untuk menjelaskan pada wilayah penelitian mengenai: Dampak Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk Terhadap unan Penggunaan Pupuk Alternatif dan Pendapatan Usahatani Melon Putih. Teknik yang digunakan adalah teknik survei terhadap petani melon putih di Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang sebagai subyek penelitian. Obyek penelitian atau Variabel pokok yang diteliti adalah : Penggunaan pupuk alternatif; produktivitas; dan pendapatan usahatani melon putih. Analisis data penelitian didasarkan pada data musim tanam bulan April- Juli 2023..

Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan penganalisaan, maka variabel-variabel penelitian perlu terlebih dahulu diberi definisi (batasan), sehingga menjadi jelas dan dapat ditentukan cara pengukurannya. Variabel penelitian diukur dengan data berskala rasio.

Jenis Sumber Dan Cara Penentuan Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang menjelaskan tentang diri dan karakteristik petani dalam konteks penerapan alat mekanisasi traktor tangan dalam usahatani melon putih ; proses produksi usahatani melon putih. Data primer tersebut diperlukan untuk menguji hipotesis sebagaimana yang diajukan. Data primer bersumber primer, yaitu diperoleh dari responden langsung. Untuk melengkapi

ataupun mendalami informasi

primer juga diambil dari informan seperti : petugas penyuluh lapang (PPL) atau subyek/lembaga lainnya.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik komunikasi langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan melalui wawancara dan observasi. Kemudian data yang tidak langsung dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan studi dokumentasi. Prosedur pengumpulan data dengan kuesioner dilaksanakan melalui daftar pertanyaan / pernyataan tertulis yang disusun untuk mendapat informasi atau keterangan dari beberapa orang.

Untuk data sekunder adalah sebagai data pendukung yang berkaitan dengan konteks variabel penelitian diperoleh dari lembaga yang berkompeten dan resmi diterbitkan. Dalam hal ini adalah : Data laporan dari kelompok tani, Dinas Pertanian Kabupaten Subang, BPP Kecamatan Patokbeusi dan lain-lainnya.

Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

Rancangan Analisis

Untuk menganalisis masalah penelitian pertama, yaitu: keragaan usahatani melon putih sebelum dan sesudah diberlakukan Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk dianalisis secara deskriptif dengan analisis tabulasi. Alat analisis statistika yang digunakan statistika deskriptif.

Untuk menganalisis produktivitas adalah capaian hasil produksi persatuan luas lahan. $Q = \text{Hasil produksi (kg) / luas lahan (ha)}$

Untuk pendapatan, dihitung dari selisih penerimaan total dan biaya total dengan formulasi sebagai berikut :

$\text{Biaya Total} = \text{Biaya Tetap Total} + \text{Biaya Variabel Total}$

$TC = TFC + TVC$

maka data

$\text{Penerimaan Total (TR)} = \text{Jumlah produk gabah}$

$(Q) \times \text{harga jual (P)}$

$\text{Pendapatan (I)} = \text{Penerimaan Total (TR)} - \text{Biaya Total (TC)}$

Dimana :

$I = \text{Income (pendapatan petani) dalam Rp/ha/musim}$

$TR = \text{Total Revenue (Penerimaan Total), dalam Rp/ha/musim}$

$TC = \text{Total Cost, (Biaya total), dalam Rp/ha/musim}$

Uji Hipotesis

Uji hipotesis 1: Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk berdampak terhadap meningkatnya penggunaan pupuk alternatif, maka digunakan teknik analisis uji t student berpasangan (*paired t test*) dengan formula dan langkah sebagai berikut:

$H_0 : |X_s - X_b| = 0$ Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk berpengaruh tidak nyata terhadap meningkatnya penggunaan pupuk alternatif.

$H_1 : |X_s - X_b| > 0$ Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk berpengaruh nyata terhadap meningkatnya penggunaan pupuk alternatif. .

.Statistika uji yang digunakan rumus sebagai berikut:

$$t_{hit} = \frac{|X_s - X_b|}{\sqrt{S_b^2 / n}}$$

Dibandingkan dengan $t_{tabel} = t_{\alpha/2} (db = n-1)$;

untuk $\alpha = 5\%$

Dimana : $X_s =$ Penggunaan pupuk alternatif sesudah Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk, dalam kg/ha/musim

X_B = Penggunaan pupuk alternatif
sebelum Kebijakan

Pengurangan Subsidi Pupuk,
dalam kg/ha/musim

S^2 = variansi (keragaman) selisih
Penggunaan pupuk alternatif
sebelum dan sesudah

Kebijakan Pengurangan
Subsidi
Pupuk

N = ukuran sampel responden

Kriteria/kaidah keputusan, yaitu :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka tolak H_0 atau terima H_1 ;
artinya Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk
berpengaruh nyata terhadap meningkatnya
penggunaan pupuk alternatif.

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka terima H_0 atau tolak H_1 ;
artinya Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk
berpengaruh tidak nyata terhadap meningkatnya
penggunaan pupuk alternatif.

Uji hipotesis 2: Kebijakan Pengurangan Subsidi
Pupuk berdampak meningkatkan biaya
produksi usahatani melon, maka digunakan
teknik analisis uji t student berpasangan
(*paired t test*) dengan formula dan langkah
sebagai berikut:

Langkah pengujian selanjutnya hipotesis
penelitian diformulasikan ke dalam hipotesis
statistika, yaitu:

$H_0 : |C_s - C_b| = 0$ Kebijakan Pengurangan
Subsidi Pupuk berpengaruh
tidak nyata terhadap biaya
produksi usahatani melon
putih.

$H_1 : |C_s - C_b| > 0$ Kebijakan Pengurangan
Subsidi Pupuk

Statistika uji yang digunakan rumus sebagai
berikut:

$$t_{hit} = \frac{|C_s - C_b|}{\sqrt{S^2 / n}}$$

Pengujia satu arah sehibgga dibandingkan
dengan $t_{tabel} = t_{\alpha} (db = n-1)$; untuk $\alpha = 5\%$

Dimana : C_s = rata-rata biaya produksi
usahatani melon putih
Kebijakan

berpengaruh nyata terhadap
biaya produksi usahatani
melon putih

Sesudah Pengurangan
Subsidi Pupuk, dalam
kg/ha/musim

C_b = rata-rata biaya produksi
usahatani melon putih
Kebijakan

Sesudah Pengurangan
Subsidi Pupuk, dalam kg
/ha/musim

S^2 = variansi (keragaman) selisih biaya
produksi usahatani melon
putih Rp/ha/musim

n = ukuran sampel responden

Kriteria/kaidah keputusan, yaitu :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka tolak H_0 atau terima H_1

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka terima H_0 atau tolak H_1 .

Uji hipotesis 3, yaitu : Kebijakan Pengurangan
Subsidi Pupuk berdampak tidak menurunkan
pendapatan usahatani melon putih, maka
digunakan teknik analisis uji t student
berpasangan (*paired t test*) dengan formula dan
langkah sebagai berikut:

$H_0 : |I_s - I_b| = 0$ Kebijakan Pengurangan Subsidi
Pupuk berdampak tidak nyata tidak menurunkan
pendapatan usahatani melon putih

$H_1 : |I_s - I_b| > 0$ Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk berdampak nyata tidak

$$t_{hit} = \frac{|I_s - I_b|}{\sqrt{S_B^2 / n}}$$

Pengujian satu arah sehingga dibandingkan

dengan $t_{tabel} = t_{\alpha} (db = n-1)$; untuk $\alpha = 5\%$

Dimana : I_s = rata-rata pendapatan usahatani melon putih sesudah Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk dalam Rp/ha/musim

I_b = rata-rata pendapatan usahatani melon putih sebelum kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk dalam Rp/ha/musim

S^2 = variansi (keragaman) selisih pendapatan usahatani melon putih sebelum dan sesudah Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk dalam Rp/ha/musim

n = ukuran sampel responden

Kriteria/kaidah keputusan, yaitu :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka tolak H_0 atau terima H_1 .

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka terima H_0 atau tolak H_1 .

Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilakukan pada petani melon putih Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pertimbangannya adalah karena di Kecamatan tersebut terdapat cukup banyak petani yang mengusahakan melon putih.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini sekitar 3 (tiga) bulan dari bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024

menurunkan pendapatan usahatani melon putih. Statistika uji yang digunakan rumus sebagai berikut:

Hipotesis 1: Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk berdampak meningkatnya penggunaan pupuk alternatif, maka digunakan teknik analisis uji t student berpasangan (*paired t test*).

hipotesis 2: Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk berdampak meningkatkan biaya produksi usahatani melon, maka digunakan teknik analisis uji t student berpasangan (*paired t test*)

hipotesis 3, yaitu : Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk berdampak tidak menurunkan pendapatan usahatani melon putih, maka digunakan teknik analisis uji t student berpasangan (*paired t test*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi dan Dampak Perubahan Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk (Permentan No. 10 tahun 2022).

Dari hasil observasi data primer dan maupun kompilasi data sekunder, dapat diketahui bahwa Penerapan Permentan No. 10 Tahun 2022 yang menggantikan Permentan No. 41 Tahun 2021 telah membawa perubahan baik secara langsung atau tidak langsung. Perubahan secara langsung adalah sebagai berikut:

Terhadap jumlah alokasi penggunaan pupuk alternative yaitu pupuk organik dimana yang semula digunakan sebanyak 2.205 kg/ha/musim tanam menjadi 4.146 kg/ha/musim tanam.

- Penggunaan dosis pupuk urea berkurang dari 300 kg/ha/musim menjadi sekitar 200 kg/ha/musim.
- Penggunaan dosis pupuk NPK phonska berkurang dari 350 kg/ha/musim menjadi sekitar 250 kg/ha/musim.
- Terjadinya aktivitas sebagian petani secara produktif mandiri terkait dalam membuat pupuk organik

Analisis Pengujian Hipotesis

- d) Terjadi semakin timbulnya kesadaran petani untuk menggunakan pupuk organik lebih baik dalam menjaga kesuburan dan menghindari kerusakan lahan pertanian.

Seiring dengan konsep yang digagas oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia meluncurkan “Gerakan Tani Pro Organik” (Genta Organik) yakni Gerakan pertanian pro organik yang meliputi pemanfaatan pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah sebagai solusi terhadap masalah pupuk mahal. Gerakan ini diharapkan mampu mendorong petani untuk memproduksi pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah secara mandiri. Namun demikian, bukan berarti program ini tidak direspon dengan baik, hanya saja untuk mengajak petani “berubah” bukanlah perkara yang mudah. Merubah kebiasaan petani tidak saja membutuhkan upaya melalui kebijakan, himbauan, anjuran, penyuluhan dan lain sebagainya namun seringkali butuh “waktu” yang cukup dan situasi yang harus “memaksa”. Ini tentu saja menjadi salah satu kendala atas penerapan kebijakan yang bermaksud “merubah” petani namun terkadang masih ada peluang untuk “tidak berubah”, maka petani akan sulit atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merubah kebiasaannya.

Manfaat Ekonomi Yang lebih Meningkatkan

Perubahan alokasi penggunaan pupuk anorganik yang berkurang ke pupuk organik yang semakin banyak dan berimplikasi terhadap meningkatnya biaya produksi usahatani melon, sebesar Rp **1.630.501/ha** atau sekitar 7,44 %/ha/musim tanam. Namun demikian produktivitas usahatani melon meningkat dari 15.668 kg/ha/musim tanam menjadi 17.111 kg/ha/musim tanam sehingga penerimaan usahatani meningkat dengan harga diasumsikan konstan Rp 7.000/kg. Kenaikan penerimaan tersebut lebih besar dari kenaikan

biaya produksi, sehingga pendapatan usahatani meningkat Rp **8.000.140/ha** atau naik sekitar 22,73 %.

Demikian secara umum kebijakan perubahan subsidi pupuk memberikan dampak positif, walaupun ada pemikiran semula akan menurunkan produksi dan produktivitas serta meningkatkan biaya produksi usahatani. Akan tetapi secara realitas di lapangan adalah terjadi justru meningkatnya produktivitas dan pendapatan usahatani melon putih. Hal tersebut terjadi karenan substitusi alokasi penggunaan pupuk organik yang lebih banyak digunakan.

Disinyalir bahwa kebijakan subsidi pupuk memperlihatkan belum efektif sebagaimana hasil penelitian yang disampaikan (Kholis, 2022). Kebijakan subsidi pupuk bertujuan untuk mendukung sektor pertanian dengan memberikan subsidi input melalui penetapan HET pupuk subsidi. Hasil penelitian bahwa kebijakan subsidi pupuk berdasarkan enam indikator tepat masih dikategorikan tidak efektif. Hal ini dikarenakan dari segi indikator tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat, serta tepat mutu belum terpenuhi. Sedangkan dari indikator tepat jenis dan tepat waktu sudah terpenuhi. Saran perlu adanya perbaikan dan pengawasan terutama pada indikator harga, jumlah, tempat, serta mutu pupuk subsidi.

Penelitian yang bertujuan mengetahui prosedur pelaksanaan program pupuk bersubsidi dan menganalisis efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani padi (Nini, 2020). Hasil penelitian berdasarkan keempat indikator, maka tiga indikator yaitu jenis, waktu dan jumlah dapat dikategorikan efektif, sedangkan untuk indikator tepat harga untuk kebijakan subsidi pupuk belum dapat dikategorikan efektif dikarenakan adanya masalah kesenjangan harga pada pupuk subsidi pada petani, Lini III (distributor) menjual pupuk subsidi diatas HET kepada Lini IV (kios resmi) karena ada tambahan biaya angkut dan bongkar

muat. Sehingga menyebabkan pengecer juga menjual pupuk subsidi kepada petani diatas HET.

Belum atau tidak efektifnys kebijakan subsidi pupuk karena berbagai factor penyebabnya, maka petani melon di daerah penelitian memperoleh pupuk terutama pupuk organik dari kios pengecer dan sebagian dari hasil membuat secara mandiri. Sikap petani melon lebih berorientasi pada kemandirian bagaimana caranya dapat memenuhi kebutuhan pupuk organik. Harga pupuk organik lebih murah bahkan dapat dibuat sendiri dan tidak merusak lahan. Ke depan sebaiknya pemerintah lebih mendorong lagi agar petani lebih baik memanfaatkan pupuk organik sesuai dengan konsep pembangunan pertanian secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk berdampak terhadap meningkatnya penggunaan pupuk organik sebagai pupuk alternatif dimana sebelumnya digunakan 2.205 kg/ha menjadi 4.146/kg atau meningkat sebesar 75,68 %. Penggunaan pupuk urea berkurang rata-rata dari 300 kg/ha menjadi 200 kg/ha atau 33,33 % dan pupuk NPK phonska dari 350 kg/ha menjadi 250 kg/ha atau 28,57 %. Berkurangnya penggunaan pupuk urea dan NPK phonska tidak berdampak menurunnya produktivitas bahkan cenderung meningkat, akibat bertambahnya pupuk organik.
2. Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk berdampak meningkatnya Biaya produksi usahatani melon putih dari Rp 35.247.955/ha menjadi Rp 36.878.455/ha atau terjadi kenaikan 7,51 % Hal tersebut karena bertambahnya penggunaan pupuk organik dan meningkatnya curahan kerja.
3. Kebijakan Pengurangan Subsidi Pupuk tidak berdampak menurunnya pendapatan

usahatani melon putih, bahkan meningkat dari Rp 74.575.330/ha menjadi Rp 82.575.470/ha. Hal tersebut karena terjadi kenaikan produktivitas dari 15.668 kg/ha menjadi 17.111 kg/ha. Hal tersebut karena bertambahnya penggunaan pupuk organik.

SARAN

1. Penggunaan pupuk organik terbukti dapat menghemat biaya dan mampu mempertahankan capaian produktivitas, sehubungan dengan hal tersebut agar petani secara konsisten dapat mempertahankannya.
2. Terkait dengan kebutuhan bahan untuk membuat pupuk organik, maka disarankan kepada petani untuk memelihara hewan ternak ayam atau domba, sehingga limbah atau kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik.
3. Diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap kebijakan pengurangan subsidi pupuk untuk petani dimana obyek komoditas nya diperluas tidak dibatasi pada komoditas sebagaimana yang sekarang diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Shinta. 2011. *Ilmu Usaha Tani*. Universitas Brawijaya Press (UB Pres), Malang.
- Azahari, Delima Hasri. 2016. *Membangun Kemandirian Pangan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/6713>
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian. 2016. *Buku Pelaksanaan Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Tahun* . Jakarta.

- BPP Kecamatan Patokbeusi , Kabupaten Subang .. 2022. *Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*. BPP Kecamatan Patokbeusi . Kabupaten Subang .
- BPS Kabupaten Subang .2020. *Kabupaten Subang Dalam Angka*, BPS Kabupaten Subang . Karawang.
- Case Karl, E., dan Fair Ray, C., 2005. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro. Terjemahan Cetakan Kelima* . Penerbit PT. Prenhalindo. Jakarta
- Desy Natasha V.D. Marbun, Sriroso Satmoko dan Siwi Gayatri. 2019. *Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pengembangan Kelompok Tani Tanaman Hortikultura Di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli*. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (Jepa) Issn: 2614-4670 (P), Issn: 2598-8174 (E) Volume 3, Nomor 3 (2019): 537-546.
- Dinas Pertanian-Pangan, Kabupaten Demak .2023. Budidaya Melon Buah Segar Penuh Manfaat. Sumber: [Http://Cybex.Pertanian.Go.Id/Artikel/100825/Budidaya-Melon-Buah-Segar-Penuh-Manfaat/](http://Cybex.Pertanian.Go.Id/Artikel/100825/Budidaya-Melon-Buah-Segar-Penuh-Manfaat/)
- Ellis, Frank.1994. *Agricultural Policies in Developing Countries*. Cambridge University Press. New York, USA
- Erwandri E, Uliya, Harimurti dan Rusnani .2021. *Analisis Pendapatan Usahatani Melon Agrowisata Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari*. Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi P-ISSN: 2580-2240 Volume 5 Nomor 2 Desember 2021
- Hernanto, F. 2004 *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya, Jakarta
- Fitri Rosalia K, Abdul Farid, Bambang Sudarmanto, 2019. *Pengaruh Partisipasi Petani Terhadap LKM-A (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis)* .Sembodomakmur. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Volume 15 No. 3.
- Gomez, K. A dan AA. Gomez, 1995. *Prosedur Statistik Untuk Pertanian* (Edisi ke-2). Sjamsuddin, E., J.S. Barhasjah (Penerjemah) Jakarta : Penerbit dari Statistical Procedures For Agricultural Research.
- Gustiyana, H. 2004. *Analisis Pendapatan Usahatani untuk Produk Pertanian*. Salemba empat: Jakarta.
- Hadisaputro, Sudarsono.1995.. Biaya dan pendapatan didalam usahatani. Departemen Ekonomi Pertanian. UGM Yogyakarta.
- Hendrawan, D. S., Daryanto, A., Sanim, B., & Siregar, H. 2011. Analisis Kebijakan Subsidi Pupuk : Penentuan Pola Subsidi Dan Sistem Distribusi Pupuk di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 8(2), 85-96. <https://doi.org/10.17358/jma.8.2.85-96>
- Hubeis, A.V.S. 2000. *Suatu Pikiran Tentang Kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan Petani*. Deptanhut. Jakarta.
- Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kementrian Pertanian. 2019. *Rencana strategis Kementrian Pertanian RI.2020-2024*. Jakarta.
- Kholis ,Ikmal dan Setiaji K.2022. *Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi* . EEAJ 9 (2) (2020) 503-515
- Kominfo, 2022. *Pupuk Subsidi di Batasi, 2023 Pemerintah hanya Subsidi Dua Jenis Pupuk*. <https://berita.kolutkab.go.id>
- Khusaini , Akhmad. 2020. *Sikap Petani Melon (Cucumis Melo L.) Terhadap Kenaikan Harga Pupuk (Studi Kasus Di Kelompok Tani Wahanakusuma,*

- Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo*. <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/3285/Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=13&isAllowed=y>
- Mardikanto, T. 2009. *Sistem Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. UNS Press. Surakarta.
- Mosher, A.T.2002. *Getting agriculture moving*. Diterjemahkan oleh Krisnandhi CV. Yasaguna. Jakarta.
- Mubyarto. 1989. *PengantarEkonomi Pertanian*. EdisiKetiga. LP3ES. Jakarta.
- Nengsi, D.,R.,dkk. 2022. *Analisis Usahatani Melon (Cucumis melo l) Pada Kegiatan Demonstration Plot di BPP Kota Manna Bengkulu Selatan*. Vol. 12 No. 1 (2022): Desember 2022
- Nini, Rigi, 2020 *Analisis Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupatenisolok*. Diploma Thesis, Universitas Andalas. <Http://Scholar.Unand.Ac.Id/56614/>
- Rachman, Benny; Agustian, Adang dan Syaifudin, Arif. 2019 *Implikasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi Beras Terhadap Profitabilitas Usaha Tani Padi Dan Harga, Kualitas, Serta Serapan Beras*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. URI: <http://124.81.126.59/handle/123456789/7474>
- Samsudin. 1993. *Peranan Kelompok Tani Dalam Berusahatani*. Penebar. Jakarta.
- Sarwono, Jonathan. 2007. *Analisa Jalur Untuk Riset Bisnis*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Silalahi, Ulber. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Karawang: PT. Refika Aditama.
- Siti Halimah & Slamet Subari . 2020. *Peran Penyuluh Pertanian Lapang Dalam Pengembangan Kelompok Tani Padi Sawah* (Studi Kasus Kelompok Tani Padi Sawah di Desa Gili Barat Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan). Jurnal Agriscience Volume 1 Nomor 1 Juli 2020.
- Soekartawi. 2001. *Agribisnis Teori dan Aplikasi*. Cetakan VI. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Karawang
- Suharno (2022). *Pengurangan Pupuk Bersubsidi Menambah Beban Petani*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/24>
- Supiyani. 2009. *Biaya dan Pendapatan didalam Usahatani Padi*. Departemen Ekonomi Pertanian. UGM Yogyakarta.
- Susanti, E. 2021.*Analisis Biaya Dan Pendapatan Usahatani Cabai Merah Keriting Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin*.Jurnal Penelitian nIlmu-Ilmu Kehutanan. > Vol 10, No 2 (2021).
- Suwarno, Bambang, 2006. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur*. Penerbit Alfabeta. Karawang
- Swastika, Dewa K.S , dkk. 2016 . *Analisis Kebijakan Peningkatan Produksi Padi melalui Efisiensi Pemanfaatan Lahan Sawah di Indonesia*.
- Syahyuti. (2007). *Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan*. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1 : 15 – 35. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.
- Utami, Pamungkas Sri (2019). *Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi*

*Usahatani Melon di Desa Curut
Kecamatan Penawangan Kabupaten
Grobogan.* , Universitas Jenderal
Soedirman. repository.unsoed.ac.id

Zakaria, W.A. 2003. *Penguatan
Kelembagaan Kelompok Tani Kunci
Kesejahteraan Petani.* Fakultas
Pertanian Universitas Lampung.

Zidratun .2019. Budidaya Cabe Merah
(*Capsicum annum* L).
<https://alamtani.com>

Zikri , M., dan Iskandar S., 2020. *Studi
Agribisnis Dan Tingkat Keuntungan
Melon Putih Milik Aji Santoso Di Desa
Pangkul Jawa Kecamatan Cambai
Kota Prabumulih.* Jurnal Societa. IX –
2: Des 2020